

Konstruksi Pesan Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Film “Java Heat”

Terrence Moulida Saleh, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Petra
Surabaya

terrencemoulida@yahoo.com

Abstrak

Melalui metode analisis narasi, penelitian ini bermaksud melihat konstruksi pesan penegakan hukum di Indonesia dalam film. Selain menarasikan penegakan hukum yang lemah di Indonesia, narator juga memunculkan atribusi-atribusi yang mengindikasikan adanya hegemoni media Hollywood. Penelitian ini menemukan perbedaan substansial antara Letnan Hashim dan Jake Travers sebagai aparat penegak hukum dari dua negara berbeda. Jake Travers digambarkan sebagai sosok Polisi Marinir AS yang heroik, sebaliknya Letnan Hashim digambarkan sebagai sosok Polisi Indonesia yang berlaku seperti pahlawan kesiangian. Narasi aparat penegak hukum dari dua negara berbeda tersebut menegaskan bahwa media Hollywood melakukan pengukuhan mitos heroisme dan penanaman ideologi bahwa aparat penegak hukum Amerika sangat hebat dan kuat.

Kata Kunci: konstruksi pesan, penegakan hukum, analisis narasi, film.

Pendahuluan

Dalam paradigma konstruktivis, realitas merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Istilah konstruksi atas realitas sosial (*social construction of reality*) menarik perhatian setelah diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann melalui bukunya yang berjudul *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociological of Knowledge* (1966) (Bungin, 2008, p. 13). Di dalam buku itu dijelaskan bagaimana paham konstruktivisme bisa begitu mempengaruhi cara pandang individu atas realitas sosialnya. Konstruktivisme dilihat sebagai sebuah kerja kognitif individu untuk menafsirkan dunia realita yang ada karena terjadi relasi sosial antara individu dengan lingkungan atau orang di sekitarnya, individu kemudian membangun sendiri pengetahuan atas realitas yang dilihat itu berdasar pada struktur pengetahuan yang telah ada sebelumnya, yang oleh Piaget disebut dengan skema/skemata (Piaget dalam Bungin, 2008, p. 14). Dalam film, individu yang dimaksud adalah sineas film yang bersangkutan. Sineas film memiliki perspektif dan pengalaman tentang berbagai macam realitas sosial, bisa berkaitan dengan ekonomi, politik, hukum, dan lain sebagainya. Namun, untuk mengangkat salah satu tema dari beberapa bidang tersebut menjadi sebuah film, pasti ada maksud tertentu yang benar-benar ingin disampaikan oleh sineas film kepada khalayaknya.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, dimana dalam konteksnya, demokrasi kerap kali disempitkan maknanya dengan kebebasan dan pemberian hak terhadap setiap warga negara, sehingga penegakan hukum sangatlah diperlukan. Realitas seputar penegakan hukum di Indonesia diungkapkan dalam sebuah penelitian berjudul “Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia Menuju Hukum Yang Responsif Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila” bahwa permasalahan esensial dari penegakan hukum di Indonesia bukan hanya semata-mata terhadap produk hukum yang tidak responsif, melainkan juga berasal dari faktor aparat penegak hukumnya (Palebangan, 2012, p. 3). Palebangan kemudian melakukan penelitian di tiga kota, yakni Makasar, Manado, dan Bitung dengan menggunakan tiga aspek dasar pengukur penegakan hukum yang dikemukakan Lawrence Friedman (1975). Ketiga aspek tersebut adalah struktur, substansi, dan kultur hukum (Friedman dalam Palebangan, 2012, p. 6).

Dari hasil penelitian itu dapat diketahui bahwa dari segi struktur hukumnya, sebanyak 70% tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor antara lain integritas aparat penegak hukum, rendahnya tingkat pelaksanaan kinerja oleh aparat penegak hukum, serta tidak diaplikasikannya nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas sehari-hari oleh aparat penegak hukum (Palebangan, 2012, p. 6). Kemudian dari segi substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sudah ketinggalan zaman dan merupakan produk peninggalan penjajah Belanda, sehingga dirasa kurang aspiratif dalam menyerap keinginan masyarakat Indonesia, dan tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Terakhir, dari segi kultur hukum yang dijalankan, sebanyak 87% responden dari 3 lokasi penelitian menyatakan bahwa aparat penegak hukum di Indonesia belum bersih dari praktek suap-menyuap (Palebangan, 2012, p. 6). Kebiasaan-kebiasaan atau praktik suap-menyuap merupakan kebiasaan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Di tengah pemberitaan dan upaya penanggulangan terorisme yang marak diberitakan media, muncullah sebuah film berjudul “Java Heat”. Film “Java Heat” adalah satu-satunya film pasca reformasi yang mengangkat tema penegakan hukum dalam aksi kriminalitas yang dibalut dengan ancaman aksi terorisme. Sejak terjadinya pemboman di Bali pada 2002 lalu, Indonesia menjadi salah satu negara yang dianggap tidak aman. Film “Java Heat” muncul dengan sebuah pandangan baru, diproduksi dan disutradarai oleh salah seorang warga Amerika Serikat bernama Conor Allyn. Film ini menjadi perwujudan kolaborasi antara budaya Barat dan Timur yang mencoba memberikan sudut pandang berbeda tentang Indonesia. Sang sutradara, Conor Allyn ingin memberikan gambaran kepada industri Hollywood kalau Islam di Indonesia tidak seperti yang mereka pikirkan, lewat film inilah ia mencoba memberikan fakta-fakta menarik tentang kebudayaan Jawa yang lembut dan keharmonisan antar umat beragama (www.21cineplex.com, “Java Heat: Kisah Apik Kolaborasi Budaya Timur dan Barat”, diakses pada 15 Maret 2014).

People are storyteller animal, ungkap Walter Fisher, manusia adalah sosok naratif yang mengalami dan memahami hidup layaknya sebuah narasi (Fisher dalam Griffin, 2006, p. 339). Maka, setiap bentuk komunikasi pada dasarnya adalah narasi yang merupakan bentukan sejarah, budaya, dan karakter (Fisher dalam Griffin, 2006, p. 339). Berbeda dengan berita, film dengan sengaja dibuat untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu dari sang pembuat film. Peristiwa pengeboman yang terjadi di Indonesia dan upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi setempat dapat disusun melalui rangkaian cerita sesuai konsep dan pengalaman Conor Allyn selama tinggal empat tahun di Indonesia sebagai produser dan sutradara film, untuk akhirnya dikemas menjadi sebuah film yang menarik dan unik. Film “Java Heat” ini tidak hanya bercerita seputar aksi kejahatan terorisme, tetapi juga bercerita tentang peran para penegak hukum di Indonesia ketika menghadapi permasalahan-permasalahan terkait keamanan negara.

Narasi bukan sekadar konstruksi peristiwa saja, melainkan juga merefleksikan dan mengkomunikasikan perubahan yang ada di masyarakat. Pola narasi yang sama belum tentu menonjolkan makna yang sama. Itulah sebabnya, narasi selalu terikat ruang dan waktu serta budaya di mana narasi itu dihasilkan (Gillespie, 2006, p. 83). Narasi secara unik berbeda dengan jenis komunikasi lainnya karena ia mendramatisasi perbedaan kultur dalam *setting* ruang dan waktu. Sebuah karakter dan *setting* dalam narasi adalah alat utama untuk memahami sebuah kultur (Littlejohn, 2009, p. 674). Terakhir, pemahaman akan narasi menjadi penting karena narasi memenuhi kebutuhan manusia akan kepuasan dan kesenangan. Audiens mengalami kesenangan ketika mengkonsumsi narasi serta termotivasi untuk mengikuti narasi dan berlanjut dalam proses identifikasi (Gillespie, 2006, p. 85). Melalui narasi, audiens menemukan hasrat atau dorongan untuk mengetahui atau menemukan sebuah jawaban.

Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan analisis naratif yang dikemukakan oleh Herman & Vervaeck. Berbeda dengan struktur narasi Propp yang hanya menitikberatkan pada karakterisasi dan seberapa besar pengaruh karakter tersebut dalam narasi. Berawal dari kerangka pemikiran dan pemahaman Genette, Luc Herman dan Bart Vervaeck (2005) juga membagi teks naratif menjadi tiga level yakni *narration*, *narrative*, dan *story*. Herman & Vervaeck lalu mengerucutkan ketiga level narasi itu ke dalam kategori-kategori yang lebih detail. Untuk kategori-kategori tersebut, mereka banyak mengutip dari Genette serta tokoh-tokoh strukturalis lainnya seperti Roland Barthes, Algirdas Greimas, hingga Gunther Müller. Hasilnya adalah sebuah kerangka analisis berbasis strukturalisme yang komprehensif dan detail. Herman & Vervaeck membuat analisis naratifnya pada setiap level naratif, berbeda dengan Genette yang fokusnya pada hubungan antar level. Atas dasar itulah, peneliti menggunakan kerangka analisis tersebut dalam penelitian ini.

Peristiwa penegakan hukum yang dibalut dalam serangkaian aksi teror membuat film “Java Heat” menarik diteliti dari sisi narasinya. Representasi realitas yang dirangkai oleh sang sineas film seolah menciptakan konteks sosial baru tentang penegakan hukum di Indonesia. Metode analisis naratif digunakan untuk mengerti

dan memahami bagaimana media dan atau sineas film mengkonstruksikan berbagai peristiwa dan kejadian, sehingga kita bisa memahami bagaimana media dan atau sineas film membangun pengetahuan kita. Dengan demikian, peneliti ingin mengetahui konstruksi pesan penegakan hukum seperti apakah yang ingin disampaikan ke masyarakat melalui film “Java Heat” ini.

Tinjauan Pustaka

Konstruksi Pesan

Harold Lasswell dalam karyanya, *The Structure and Function of Communication in Society*, mengatakan bahwa cara terbaik untuk menjelaskan komunikasi adalah menjawab pertanyaan sebagai berikut: *Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?* (Effendy, 1992, p. 10). Dari paradigma tersebut dapat diketahui unsur-unsur komunikasi seperti: komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Dalam komunikasi, pesan merupakan salah satu unsur yang sangat penting sebab proses komunikasi terjadi dikarenakan adanya pesan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Pesan dapat diartikan sebagai suatu makna yang ingin disampaikan oleh seorang komunikator kepada komunikan yang dimaksudkan untuk mencapai kesamaan maksud antara komunikator dan komunikan (Effendy, 2003, p. 30). Pesan tersebut dapat tertulis maupun lisan, yang di dalamnya terdapat simbol-simbol yang bermakna dan telah disepakati antar pelaku komunikasi.

Mengingat pentingnya pesan dalam sebuah proses komunikasi, maka pesan sebaiknya diproduksi dengan baik agar komunikan dapat memahami isi pesan dengan baik. Dalam paradigma konstruksionis, isi media pada hakikatnya adalah hasil konstruksi realitas, hal ini disebabkan karena sifat dan faktanya bahwa pekerjaan media massa adalah menceritakan peristiwa-peristiwa (Sobur, 2001, p. 88). Bentuk media massa bisa bermacam-macam, bisa koran, majalah, tayangan berita di televisi, atau film. Dari kamus ilmiah populer, konstruk merupakan konsepsi, bentuk susunan (bangunan), rancang, menyusun, membangun, melukis dan memasang (Partanto dan Al Barry, 1994, p. 365). Konstruksi pesan dapat diartikan penyusunan dari realitas-realitas yang saling berkaitan agar terbentuk suatu pesan yang bermakna bagi komunikannya. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa konstruksi pesan adalah sebuah aktifitas yang bertujuan untuk membangun suatu makna kepada orang lain.

Konstruksi pesan juga tidak bisa dilepaskan dari si pembuat pesan (komunikator). Dalam film misalnya, yang bertindak sebagai komunikator adalah sineas film. Setiap pembuat film hidup dalam masyarakat atau dalam lingkungan budaya tertentu, maka itu proses kreatif yang terjadi merupakan pergulatan antara dorongan subyektif dan nilai-nilai yang mengendap dalam diri (Sumarno, 1996, p. 12). Atau dengan kata lain, “dunia” yang direpresentasikan dalam film merupakan “dunia” yang dilihat dan dikenal sineas tersebut dan tidak heran jika terselip ideologi-ideologi tertentu yang mewakili pemikiran dan perasaan sineas film. Ideologi-ideologi tersebutlah yang akhirnya juga turut mempengaruhi

penontonnya, sebagai komunikan, untuk mempersepsi dunia yang direpresentasikan oleh sineas film.

Penegakan Hukum

Menurut Asshiddique (n.d.) penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atauberfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (p. 1). Lawrence M. Friedman menjelaskan ada tiga unsur atau komponen dalam sistem hukum yang merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Ketiga komponen itu adalah komponen struktur, komponen substansi, dan komponen kultur atau budaya hukum (Friedman dalam Soepiadhy, 2012, surabayapagi.com). Ketiganya membentuk satu kesatuan yang bulat dan utuh, serta saling berhubungan, atau yang biasa disebut dengan sistem.

Menurut Friedman dalam Soepiadhy, komponen struktur adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, berkaitan dengan lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, penyidikan, dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum (Friedman dalam Soepiadhy, 2012, surabayapagi.com). Struktur adalah kerangka sistem hukum, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan sebuah bentuk dan batasan terhadap keseluruhan bangunan hukum (Friedman dalam Soepiadhy, 2012, surabayapagi.com). Struktur hukum ditampilkan dalam bentuk lembaga-lembaga atau individu petugas pelaksana lembaga tersebut. Contoh dari struktur hukum yaitu: Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya.

Komponen kedua adalah substansi. Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut (Friedman dalam Soepiadhy, 2012, surabayapagi.com). Dengan kata lain, substansi bisa disebut sebagai suatu hasil nyata, produk yang dihasilkan, yang diterbitkan oleh sistem hukum tersebut. Elemen substansi meliputi peraturan-peraturan yang nyata, norma dan pola perilaku dari orang-orang di dalam sistem tersebut. Hasil nyata ini dapat berbentuk *in concreto*, atau norma hukum individu yang berkembang dalam masyarakat, hukum yang dianut dalam masyarakat (*living law*), maupun hukum *in abstracto*, atau norma hukum umum yang tertuang dalam kitab undang-undang (*law in books*) (Friedman dalam Soepiadhy, 2012, surabayapagi.com).

Komponen ketiga adalah budaya hukum. Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya (Friedman dalam Soepiadhy, 2012, surabayapagi.com). Kultur atau budaya hukum berupa sikap atau tindakan masyarakat beserta nilai-nilai yang dianutnya. Budaya hukum dapat juga dikatakan sebagai keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum beserta sikap atau tindakan yang mempengaruhi hukum, seperti adanya rasa malu, rasa bersalah apabila melanggar hukum dan sebagainya (Friedman dalam Soepiadhy, 2012, surabayapagi.com).

Analisis Narasi Luc Herman & Bart Vervaeck

Berawal dari kerangka pemikiran Genette, Luc Herman dan Bart Vervaeck (2005) juga membagi teks naratif menjadi tiga level yakni *narration*, *narrative*, dan *story*.

1. *Story*

Level *story* merupakan level teks abstrak yang berisikan kronologi rangkaian peristiwa. Herman dan Vervaeck kemudian membagi level ini ke dalam tiga bagian, yakni *actions* atau *events*, *actants*, serta *setting*. *Actions* atau *events* mengacu pada peristiwa atau aksi yang dinarasikan. Untuk menguraikan urutan peristiwa yang terjadi dalam level abstrak tersebut, Herman dan Vervaeck mengambil pembagian dari Ronald Barthes.

2. *Narrative*

Level *narrative* merupakan level kedua dalam teks naratif. Herman & Vervaeck membagi level ini dalam tiga bagian, yakni *time*, *characterization*, dan *focalization*.

3. *Narration*

Level *narration* menjadi level terakhir dan paling konkrit dari semua level. Ia berfokus pada formulasi atau cara penyajian narasi yang terlihat kepada pembaca. Terdiri dari *narrating* dan *representation of consciousness*. Bila *story* melibatkan unsur-unsur yang tidak terlihat di dalam teks, maka *narration* berkaitan dengan kalimat konkrit dan kata-kata yang dimunculkan di dalam teks. Bila *narrative* fokus pada persepsi dari peristiwa, maka *narration* fokus pada cara peristiwa dikatakan atau dituliskan dalam teks (Herman & Vervaeck, 2005, p. 80).

Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan dua level dari tiga level analisis narasi Herman & Vervaeck (2005), yakni level *Story* dan level *Narrative*. Level *Narration* tidak digunakan karena sifat subyek penelitian yang tidak menampakkan narator dalam narasi, sehingga level tersebut dianggap tidak relevan dengan penelitian ini.

Metode

Konseptualisasi Penelitian

Konsep dalam penelitian ini mengaitkan konsep konstruksi pesan dan penegakan hukum dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Kemudian metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah analisis narasi Luc Herman & Bart Vervaeck (2005). Level analisis narasi terdiri dari level *story* (*actions* atau *events*, *actants*, serta *setting*), level *narrative* (*time*, *characterization*, dan *focalization*), dan level *narration* (*narrating* dan *representation of consciousness*). Namun karena sifat subyek penelitian yang tidak menampakkan dan melibatkan narator dalam narasi, sehingga level *Narration* tidak digunakan. Dengan demikian, level *Narration* dianggap tidak relevan dengan penelitian ini.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah film “Java Heat” secara keseluruhan, dengan objeknya adalah konstruksi pesan penegakan hukum dalam film. Unit analisis dalam penelitian ini adalah teks media, yakni *scenes* yang memuat pesan penegakan hukum.

Analisis Data

Analisis naratif diawali dengan melakukan pemilihan teks yang terbatas. Peneliti kemudian membuat *coding sheet* berdasarkan adegan-adegan yang memuat pesan penegakan hukum dalam film tersebut untuk kemudian diidentifikasi dan dikategorisasikan ke dalam teori narasi milik Luc Herman dan Bert Vervaeck. Namun karena sifat subyek penelitian yang tidak menampilkan dan melibatkan narator dalam narasi, sehingga level *Narration* tidak digunakan. Dengan demikian, level *Narration* dianggap tidak relevan dengan penelitian ini. Setelah kategorisasi, dilakukan interpretasi mendalam oleh peneliti terhadap temuan-temuan awal mengenai film.

Temuan Data

Events, Time, Setting, dan Focalization

Dalam penelitian ini terdapat 22 *scenes* utama dan 2 *sub-scenes* (*scene 1b* dan *scene 7b*) yang memuat pesan penegakan hukum dalam film, dimana setiap *scene* memiliki penjelasan *events, time, setting, dan focalization* masing-masing.

Actants dan Characterization

Dalam penelitian ini terdapat 10 *actants*, yakni: Letnan Hashim, Jake Travers, Malik, Sersan Anton, Pak Jenderal, Sultana, Sultan, Perdana Menteri, Achmad, dan Tai Lung. *Actants* tersebut memiliki peran dan karakterisasi masing-masing pada narasi pesan penegakan hukum dalam film.

Analisis dan Interpretasi

Representasi Detasemen 88 Sebagai Institusi Penegakan Hukum

Detasemen 88 yang direpresentasikan dalam film ini bukanlah Detasemen 88 yang ada di dunia nyata. Menurut peneliti, Detasemen 88 dalam film hanya sebatas nama yang diberikan oleh narator pada kesatuan kepolisian di Indonesia, seperti NYPD (*New York Police Department*) dalam film-film Amerika, bukan sebagai kesatuan khusus dalam kepolisian yang menangani kasus terorisme. Hal ini peneliti sadari saat proses penelitian di awal bulan April 2014, ketika peneliti melakukan pengodingan. Dalam melakukan proses pengodingan, peneliti menyadari adanya kejanggalan-kejanggalan mengenai penggambaran Detasemen

88, yakni penggambaran cara kerja dan atribusi-atribusi anggota Detasemen 88 dalam film sangat bertolak belakang dengan Densus 88 di dunia nyata.

Pengamat kepolisian dari Universitas Padjajaran, Muradi, mengatakan, dukungan persenjataan dan peralatan Densus 88 memang sangat modern, misalnya, senapan serbu jenis Colt M4 5.56 milimeter, Steyr-AUG, Armalite AR-10, dan *shotgun* model Remington 870 yang ringan dan sangat andal buatan Amerika Serikat (“Sederet Peralatan Canggih Densus 88”, tempo.co, 08 Maret 2013). Namun dalam film, Letnan Hashim yang diceritakan sebagai detektif kesatuan Detasemen 88 hanya bersenjata pistol genggam. “Tak hanya persenjataan, tiap personel Densus 88 juga memiliki perlengkapan pribadi dan tim,” tulis Muradi dalam buku *Densus 88 AT; Konflik, Teror, dan Politik*, “Misalnya, alat komunikasi personal, GPS, kamera pengintai malam, alat penyadap dan perekam mikro, pesawat *interceptor*, dan mesin pengacak sinyal.” (“Sederet Peralatan Canggih Densus 88”, tempo.co, 08 Maret 2013). Tetapi dalam film, narator malah banyak menggambarkan bahwa Detasemen 88 adalah sebuah institusi penegakan hukum yang sangat kuno dan ketinggalan zaman melalui atribut-atribut yang digunakan dan *setting* markas Detasemen 88. Hal tersebut menunjukkan bahwa narator film “Java Heat” ini tidak kredibel dalam merepresentasikan Detasemen 88 sebagai kesatuan khusus yang menangani aksi terorisme di Indonesia.

Tidak Terstrukturnya Proses Penegakan Hukum di Indonesia

Menurut Lawrence M. Friedman, unsur atau komponen pertama dalam sistem hukum yang merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah komponen struktur (Friedman dalam Soepiadhy, 2012, surabayapagi.com). Dari keempat kronologi peristiwa (*events*) di *scene 2*, *scene 3*, *scene 8*, dan *scene 10* ini jelas sudah bahwa melalui karakter Letnan Hashim dan Pak Jenderal sebagai bagian dari Detasemen 88, mereka melanggar komponen struktur ketika menjalankan tugas penegakan hukum. Hal ini menjadi sangat krusial sebab struktur merupakan kerangka sistem hukum yang ditampilkan dalam bentuk lembaga-lembaga atau individu petugas pelaksana lembaga tersebut (Friedman dalam Soepiadhy, 2012, surabayapagi.com). Film ini menghadirkan representasi aparat penegak hukum yang tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Representasi seperti ini juga kerap ditemukan dalam narasi di sinetron-sinetron televisi Indonesia, dimana aparat penegak hukum kerap digambarkan melakukan salah tangkap hanya dengan berbekal kecurigaan semata tanpa membawa bukti yang cukup. Representasi lain yang kerap dimunculkan dalam sinetron-sinetron televisi Indonesia adalah aparat penegak hukum Indonesia adalah aparat penegak hukum yang korup, mereka bisa dibayar dengan sejumlah uang dan kemudian diminta menangkap seseorang yang belum tentu bersalah.

Selain itu, kronologi peristiwa pada *scene 10* seperti serupa tapi tak sama dengan film *The Raid* (2012). Film *The Raid* (2012) mengisahkan tentang Polisi korup bernama Wahyu, yang memerintahkan polisi jujur bernama Rama untuk melakukan penyergapan di blok apartemen kumuh sarang narkoba, gangster, dan mafia. Kesamaannya terletak pada oknum polisi yang tidak kredibel memerintahkan melakukan operasi penyergapan. Jika Pak Jenderal tidak kredibel

dari sisi penyelidikan yang kurang mendalam dan tidak adanya alat bukti yang cukup untuk menetapkan Faruq Al 'Assan sebagai tersangka utama dan melakukan penyeragaman terhadapnya, namun Wahyu lebih parah. Ia memerintahkan Rama dan timnya melakukan penyeragaman demi misi balas dendamnya pada *gangster* dan mafia narkoba di blok itu karena sudah menghentikan pemberian uang jatah keamanan pada dirinya. Dalam hal ini, unsur struktural yang dilanggar oleh Wahyu adalah ia tidak pernah melaporkan kejahatan mafia di blok apartemen itu pada institusinya, sebab ia sendiri pun terlibat dalam upaya mendukung kelancaran bisnis narkoba para mafia tersebut.

Tidak hanya itu, bahkan media berita Indonesia dengan tegas menyebutkan bahwa penegakan hukum di Indonesia itu lemah melalui pernyataan yang disampaikan oleh Presiden SBY, seperti kutipan berita berikut ini.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui kondisi penegakan hukum di Indonesia masih belum sekuat seharusnya. Jika dibiarkan, **lemahnya penegakan hukum ini**, kata SBY, bisa menggerogoti pencapaian Indonesia di bidang kebebasan dan perlindungan hak asasi manusia.... .."Satu yang **masih goyah**, yaitu *rule of law*," kata dia ("SBY Akui Penegakan Hukum di Indonesia Lemah", tempo.co, 27 Juli 2013).

Tidak Substantifnya Proses Penegakan Hukum Di Indonesia

Unsur atau komponen kedua dalam sistem hukum menurut Friedman adalah komponen substansi. Elemen substansi ini menjadi penting karena meliputi peraturan-peraturan yang nyata, norma dan pola perilaku dari orang-orang di dalam sebuah sistem hukum (Friedman dalam Soepiady, 2012, surabayapagi.com). Namun sayangnya, aparat penegak hukum yang digambarkan dalam narasi film ini justru tidak dapat mengaplikasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut peneliti, ini bukanlah representasi yang relevan dengan konteks aparat penegak hukum di Indonesia. Lagi-lagi peneliti menyadari tidak kredibelnya narator dalam mengkonstruksi representasi hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia pada saat melakukan proses pengodingan pada April 2014. Peneliti merasa bahwa narator tidak benar-benar mengkonstruksikan aparat penegak hukum di Indonesia dengan baik, sebab faktanya aparat penegak hukum Indonesia tidak pernah sefatal ini melakukan pelanggaran sistem hukum. Seperti contoh Johan Budi, juru bicara KPK misalnya, ia yang bukan aparat penegak hukum saja sangat sadar bahwa komponen substansi sangatlah penting ketika menetapkan seseorang menjadi tersangka dari sebuah kasus, apalagi aparat penegak hukum yang sesungguhnya (polisi, jaksa, hakim, pengacara), sudah pasti mereka sangat memahami penegakan hukum secara prosedural dan substansial. Dalam hal ini, peneliti sangat tidak setuju dengan hasil konstruksi yang digambarkan oleh narator film "Java Heat". Narator terlalu berlebihan merendahkan reputasi dan kredibilitas Kepolisian RI, seolah-olah Kepolisian RI itu benar-benar institusi lemah dan bodoh.

Bentuk Hegemoni Media Hollywood Melalui Perbandingan Karakter Penegak Hukum Amerika dan Penegak Hukum Indonesia: Rambo vs Pahlawan Kesiangan

“Without question, Hollywood loves the action that can be found in policing. Police action lends itself well to the special effects of gunfire and the danger of a high-speed chase. These police action sequences have created some of the most memorable scenes in Hollywood history” (Tanpa bertanya, Hollywood sangat menyukai aksi yang bisa ditemukan di kepolisian. Aksi polisi itu sendiri menjadi cocok dengan efek khusus dari tembakan dan bahaya dari sebuah kejaran berkecepatan tinggi. Urutan aksi polisi ini telah menciptakan beberapa adegan yang paling mengesankan dalam sejarah Hollywood) (Crawford, 1999, albany.edu).

Pernyataan Crawford tersebut menegaskan bahwa dalam setiap produksi film, Hollywood selalu menyelipkan unsur-unsur *action* dalam menggambarkan karakter aparat kepolisian mereka. Tak terkecuali film “Java Heat” ini. Film besutan sineas Hollywood, Rob Allyn dan Conor Allyn ini menggambarkan sosok Polisi Marinir AS bernama Jake yang aktif melakukan aksi-aksi tembakan ketika menghadapi penjahat di dalam narasi. Namun, penggambaran karakter Jake sebagai Polisi Marinir AS ternyata juga menghasilkan penggambaran lain tentang Letnan Hashim sebagai Letnan Polisi di kesatuan Detasemen 88. Dalam narasi ini terdapat sebuah dominasi kekuatan aparat penegak hukum Amerika atas aparat penegak hukum Indonesia, sehingga gambaran yang muncul dalam narasi adalah aparat penegak hukum Indonesia itu lemah.

Bukan hanya film “Java Heat” saja yang menyuguhkan *action* dan cara bercerita tiga babak. Film-film Hollywood lain pun diceritakan sama. Sebut saja film *Red Dawn* (2012) dan *Olympus Has Fallen* (2013). Ketiganya sama-sama menyuguhkan *action* yang dilakukan pemeran utamanya. Hal ini menunjukkan betapa industri film Hollywood begitu ingin menonjolkan superioritas aparat penegak hukumnya. Bahkan dalam sebuah penelitian berjudul “Pesan Hegemoni Tersirat Pada Film Hollywood” karya Jennifer Fay disebutkan bahwa kedua film di atas (*Red Dawn* dan *Olympus Has Fallen*) mengandung unsur hegemoni media (Fay dalam Ramadhan, 2014, fikom.tarumanagara.ac.id). Menurut Fay dalam penelitiannya, Amerika Serikat melakukan pengukuhan mitos heroisme, serta penanaman ideologi bahwa Korea Utara tidak lebih kuat dari Amerika Serikat melalui pesan hegemonis kedua film tersebut (Fay dalam Ramadhan, 2014, fikom.tarumanagara.ac.id).

Konsep hegemoni pertama kali diperkenalkan oleh Gramsci (1891-1937), seorang pemikir politik terpenting setelah Marx. Berbeda dengan dominasi dengan penggunaan kekuatan yang bersifat memaksa, hegemoni lebih menekankan pada praktik *soft power* yang kemudian membentuk konsensus umum (Gramsci dalam Rinaldi, 2011, p. 37). Konsensus itu kemudian yang membuat suatu masyarakat tunduk dan patuh tanpa sadar secara sukarela atas ideologi dominan (Gramsci dalam Rinaldi, 2011, p. 38). Dalam hal ini, Amerika melalui film-filmnya memproduksi pesan dengan ideologi superioritas dan heroisme pada tokoh-tokoh dalam narasinya. Sebagian besar film-film Hollywood menggambarkan sosok *hero*

identik dengan maskulinitas. Sosok *hero* laki-laki yang ditampilkan adalah laki-laki muda, kulit putih, ganteng, dan atletis. Jika kita melihat sosok Jed Eckert dalam *Red Dawn* (2012), Mike Bunning dalam *Olympus Has Fallen* (2013) dan Jake Travers dalam film “*Java Heat*” ini, kita seolah diberi suguhan sosok pria idaman sesuai konvensi yang berlaku secara universal. Mereka semua tampan, muda, berkulit putih, bertubuh atletis, dan ‘sangat laki-laki’ karena aksi-aksi bela diri dan ketangkasan bersenjata yang mereka miliki. Sosok *hero* dalam film-film Hollywood yang direpresentasikan melalui tokoh protagonis lebih sering ditampilkan sebagai sosok yang kuat dengan tubuh berotot karena seorang *hero* harus melakukan tindakan-tindakan berani dan berbahaya untuk melindungi yang lemah (Adi dalam Jiyantoro, 2010, p. 130). Dan hal ini memperkuat konsep maskulinitas yang melekat pada diri aparat penegak hukum Amerika yang dikonstruksikan bak pahlawan.

Melalui film “*Java Heat*”, Amerika seolah-olah ingin menciptakan sosok Polisi Marinir bak pahlawan yang hebat, kuat, dan tak tertandingi. Beberapa gambaran yang menonjolkan sisi maskulinitas dari sosok *hero* dalam film ini diantaranya, saat Jake menunjukkan keahlian bersenjatanya ketika melawan Achmad cs. Jake yang seorang diri melawan Achmad cs, berhasil menumpas dua orang kawan Achmad dan membuat Achmad lari tunggang langgang. Setelah Achmad pergi, Jake bergegas menolong Letnan Hashim yang sedang terluka parah akibat ditabrak oleh Achmad. Gambaran sisi maskulinitas lainnya adalah saat Jake berolahraga di rumahnya dan berusaha berkomunikasi dengan temannya di Amerika untuk mencari tahu tentang gambar macan yang ia temukan di tubuh mayat korban. Saat berolahraga, narator sengaja mengekspos bentuk tubuh Jake yang berotot dan menyelipkan adegan saat Letnan Hashim merokok. Lebih lanjut, narator juga menggambarkan sosok Jake yang begitu konsisten melakukan pencarian pada Malik dari saat melakukan penyelidikan hingga saat mengejar Malik ke Candi Borobudur. Ini menunjukkan bahwa Jake sangat berorientasi menyelesaikan kasus hingga tuntas. Penggambaran sosok Jake ini semakin menegaskan adanya unsur hegemoni media Hollywood. Melalui penggambaran sosok *hero* dalam film-filmnya, termasuk dalam film “*Java Heat*” ini, Amerika melakukan pengukuhan mitos heroisme serta penanaman ideologi bahwa aparat penegak hukum Indonesia tidak lebih kuat dan hebat dari aparat penegak hukum Amerika.

Namun penggambaran yang disuguhkan narator film “*Java Heat*” ini benar-benar penggambaran yang tidak seimbang. Peneliti melihat bahwa kredibilitas narator sangat dipertanyakan dalam mengkonstruksi pesan penegakan hukum di Indonesia. Narator yang mengaku sudah melakukan riset selama lima tahun untuk membuat film ini, peneliti rasa tidak bisa memformulasikan data yang ia dapatkan dengan baik dan matang. Hegemoni media Hollywood justru sangat terasa, Rob Allyn dan Conor Allyn sebagai narator tampak sekali ingin menjatuhkan reputasi dan kredibilitas kesatuan Densus 88 sebagai institusi penegakan hukum anti-terorisme dengan dominasi-dominasi superioritas yang ditonjolkan melalui karakter Jake Travers. Padahal faktanya, Densus 88 beserta seluruh anggotanya tidak selemah dan sebodoh seperti konstruksi dalam narasi film. Sebab sebelum beroperasi, anggota kepolisian yang ditunjuk sebagai anggota Densus 88 harus

menjalani serangkaian pendidikan dan pelatihan anti-terorisme dari organisasi intelijen Amerika Serikat: CIA dan FBI (“Densus 88 Dilatih CIA dan FBI”, tempo.co, 08 Maret 2013). Dengan kata lain, Densus 88 sudah pasti berisikan orang-orang handal dari Kepolisian RI dengan kualifikasi terbaik di bidangnya. Apalagi, seluruh anggota Densus 88 dilengkapi dengan peralatan-peralatan canggih ketika beroperasi. Jadi, hegemoni yang berusaha ditampilkan narator dalam film ini terasa begitu mustahil.

Simpulan

Penggambaran yang disuguhkan narator film “Java Heat” ini benar-benar penggambaran yang tidak seimbang. Kredibilitas narator sangat dipertanyakan dalam mengkonstruksi pesan penegakan hukum di Indonesia. Narator yang mengaku sudah melakukan riset selama lima tahun untuk membuat film ini, ternyata tidak bisa memformulasikan data yang ia dapatkan dengan baik dan matang. Hegemoni media Hollywood justru sangat terasa, padahal faktanya, institusi penegakan hukum beserta aparat penegak hukum di Indonesia tidak selemah dan sebodoh seperti konstruksi dalam narasi film.

Daftar Referensi

- Asshiddique, J. (n.d.), Penegakan Hukum. Retrieved June 10th, 2014 from http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.
- Bungin, B. (2008). *Konstruksi sosial media massa*. Jakarta: Kencana.
- Crawford, C. 1999. *Law enforcement and popular movies: Hollywood as a teaching tool in the classroom*. *Journal of Criminal Justice and Popular Culture*: ISSN 1070-8286. Retrieved on May 24th, 2014 from <http://www.albany.edu/scj/jcipc/vol6is2/crawford.html>.
- Effendy, O. U. (1992). *Ilmu komunikasi: teori dan praktik*. Bandung: PT. RemajaRosdakarya.
- Effendy, O. U. (2003). *Ilmu, teori, dan filsafat komunikasi*. Bandung: PT. RemajaRosdakarya.
- Gillespie, M. Toynbee. (2006). *Analysing media text*. London: Open University Press.
- Griffin, E. M. (2006). *A first look at communication theory*. Singapore: McGrawHill.
- Herman, L., Vervaeck, B. (2005). *Handbook of narrative analysis*. USA: University of Nebraska Press.
- Littlejohn, S. W., Karen A. F. (2009). *Encyclopedia of communication theory*. USA: Sage Publications.
- Palebangan, Y. (2012). *Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia Menuju Hukum Yang Responsif Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila (published-thesis)*. Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Partanto, P. A., M. Dahlan Al Barry. (1994) *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka.
- Rinaldi, M. 2011. *Hegemoni ideologi demokrasi liberal amerikas erikat dan wacana global war on terror dalam media massa*. Depok: FISIP UI.
- Sobur, A. (2001). *Analisis teks media: suatu pengantar untuk analisis wacana, analisis semiotik, dan analisis framing*. Bandung: PT. RemajaRosdakarya.
- Sumarno, M. (1996). *Dasar-dasar apresiasi film*. Jakarta: PT. Grasindo.
- 21cineplex.com. (2013). *Java heat: kisah apik kolaborasi budaya timur dan barat*. Retrieved March 15th, 2014 from <http://www.21cineplex.com/review/java-heat-kisah-apik-kolaborasi-budaya-timur-dan-barat.2837.htm>.
- Surabayapagi.com. (16-05-2012). *Penegakan hukum Lawrence m. friedman*. Retrieved on May, 16th 2014 from <http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b81298296227660ea2c84985834b026e06e0bcda02>.